

**LAPORAN AKHIR MAGANG**

**PENGARUH STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERHADAP  
EFEKTIVITAS OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH (BPBD) SULAWESI TENGAH**



**Ichfa Farida Ramadhani**

Student Number : 21312289

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERHADAP  
EFEKTIVITAS OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH (BPBD) SULAWESI TENGAH**

Dibuat oleh :

Ichfa Farida Ramadhani

Student Number : 21312289



Disahkan oleh,

Yogyakarta, Desember 2025

Dosen Pembimbing



Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si., CMA., C

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Ichfa Farida Ramadhani

NIM : 21312289

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : **Pengaruh Strategi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Terhadap Efektivitas Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah**

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Proposal magang ini merupakan karya tulis saya pribadi tanpa campur tangan oleh pihak lain, selain pembimbing dan narasumber yang berkaitan.
- 2) Keseluruhan proposal magang ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun baik di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Dalam proposal magang ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah diakui hak milik oleh orang lain kecuali dituliskan sebagai rujukan dalam penulisan dan tercantum pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 September 2025



Ichfa Farida Ramadhani

21312289

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan kegiatan magang ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dengan tema kajian "Pengaruh Strategi Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap Efektivitas Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah". Melalui kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan dalam setiap proses penyelesaian laporan kegiatan magang ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFrA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si., CMA., CertSAP., yang berperan sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dengan penuh kesabaran sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan dukungan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua serta adik-adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril, materiil, dan doa yang tiada henti.
9. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang dan penelitian, khususnya pada divisi tata kelola keuangan dan aset.
10. Ayu Najla Syahirah, Berlian Putri Isnain, Gaebriilia Nur Faizah, Astria Rachmawati, serta rekan-rekan di Grup KPA, Grup BB, Mata Elang, dan KKN 70 YOI yang telah menjadi teman seperjuangan sejak awal hingga akhir masa studi.
11. Mba Hasna serta teman-teman di Pondok CC yang telah memberikan keceriaan dan dukungan selama menjalani masa perkuliahan.

12. Alfa Rizky dan Nur Amalia yang telah memberikan kontribusi dan bantuan yang sangat berarti kepada penulis dalam proses penelitian.
13. Berbagai pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah turut berperan dalam mendampingi dan mendukung perjalanan akademik penulis.

Penulis memahami bahwa laporan magang ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan serta kritik konstruktif demi penyempurnaan karya di kemudian hari. Besar harapan penulis agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR MAGANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Laporan Magang.....	4
1.4. Manfaat Laporan Magang.....	4
1.5. Sistematika Penulisan Laporan.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Strategi Pengelolaan Keuangan.....	9
2.3. Strategi Pengelolaan Aset.....	9
2.4. Efektivitas Operasional.....	10
2.5. Konsep dan Pengertian Pendapatan.....	11
2.6. Hubungan Antara Penyusutan dan Pendapatan.....	12
2.7. Penilaian Pendapatan dan Estimasi Penyusutan.....	13
2.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Operasional.....	13
2.9. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Publik.....	13
2.10. Kewajiban Pelaporan dan Audit.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	15
3.2. Populasi Dan Sampel.....	15

3.3. Sumber Data.....	16
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.5. Metode Analisis Data.....	17
<b>BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG.....</b>	<b>18</b>
4.1. Profil Lokasi Magang.....	18
4.2. Aktivitas Magang.....	25
4.3. Kegiatan magang.....	26
4.4 Hasil dan Pembahasann.....	34
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Keterbatasan.....	46
5.3. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3. 1 Skala Likert	17
Tabel 3. 2 Interpretasi Nilai	17
Tabel 4. 1 Kegiatan Harian	31
Tabel 4. 2 Strategi Pengelolaan Keuangan	35
Tabel 4. 3 Rincian Straregi Pengelolaan Keuangan	36
Tabel 4. 4 Klasifikasi Aset	37
Tabel 4. 5 Rincian Aset Tetap	38
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas	40
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linear	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Lokasi Magang	18
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian	50
Lampiran 2 Kuisisioner	52
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas, Uji Reabilitas Dan Regresi Linear	58

## ABSTRAK

Kajian ini didasari oleh signifikansi tata kelola keuangan dan aset dalam menunjang kinerja operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah yang memiliki peran strategis dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Tujuan kajian ini adalah menganalisis strategi tata kelola keuangan dan aset, mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja operasional, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang tepat. Kajian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan kuesioner kepada pegawai BPBD bagian keuangan dan aset. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear berganda untuk mengukur dampak variabel independen terhadap kinerja operasional. Hasil kajian menunjukkan realisasi anggaran BPBD tahun 2024 mencapai 89–100% untuk sebagian besar program, meskipun beberapa kegiatan masih rendah seperti penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang hanya 38%. Aset tetap mendominasi dengan nilai buku Rp19,6 miliar, terutama pada kategori peralatan dan mesin. Hasil uji regresi menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,817, yang berarti 81,7% kinerja operasional dipengaruhi oleh strategi tata kelola keuangan dan aset, sedangkan 18,3% dipengaruhi faktor lain. Kesimpulan kajian menunjukkan bahwa strategi tata kelola keuangan dan aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional BPBD. Kendala seperti keterbatasan SDM, sistem informasi yang belum optimal, dan realisasi anggaran rendah pada beberapa kegiatan perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan perbaikan mekanisme perencanaan anggaran.

**Kata Kunci:** Strategi, Pengelolaan, Keuangan, Aset, BPBD

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tata kelola keuangan dan aset yang optimal menjadi fondasi esensial dalam mewujudkan akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks lembaga pemerintahan, administrasi keuangan dan kekayaan negara wajib diselenggarakan dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap koridor hukum yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya inefisiensi anggaran, meningkatkan performa organisasi, serta menghadirkan layanan publik yang berkualitas. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan tepat, hal ini dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Mutu administrasi finansial pada tingkat pemerintahan lokal sangat dipengaruhi oleh implementasi standar akuntansi yang sesuai. Sukran, Rajindra, dan Dicky Yusuf (2020) menegaskan bahwa laporan finansial yang memiliki kredibilitas tinggi perlu memenuhi sejumlah kriteria kualitatif, antara lain: nilai relevansi informasi, tingkat keandalan data, kemampuan untuk dibandingkan antarperiode, serta kemudahan dalam pemahaman sesuai ketentuan SAP. Pengalaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama periode 2014-2018 membuktikan bahwa implementasi SAP yang konsisten menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki posisi strategis dalam menyelenggarakan penanganan bencana di tingkat daerah. BPBD memiliki tanggung jawab mencakup mitigasi risiko, kesiapsiagaan menghadapi bencana, respons tanggap darurat, hingga proses pemulihan pascabencana. Dalam melaksanakan fungsinya, BPBD dituntut beroperasi dengan cepat dan presisi, sehingga efektivitas operasional menjadi aspek

yang sangat vital. Efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, sistem tata kelola keuangan yang andal, serta pengelolaan aset operasional seperti armada kendaraan, peralatan evakuasi, dan logistik kebencanaan. Tanpa tata kelola yang memadai, respons terhadap bencana dapat terganggu dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Studi yang dilakukan Pakaya dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa keberhasilan penerapan SAP dengan basis akrual sangat ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yaitu: kompetensi personel, dedikasi organisasional, pemanfaatan sistem informasi teknologi, serta efektivitas komunikasi internal. Temuan ini relevan dengan kondisi BPBD yang memerlukan SDM kompeten dan sistem yang terintegrasi untuk mendukung pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Penetapan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tempat pelaksanaan magang dilandasi oleh kontribusi signifikan institusi tersebut dalam upaya pengurangan risiko dan penanganan bencana pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman alam, termasuk gempa tektonik, banjir bandang, dan tanah longsor. BPBD Sulawesi Tengah menghadapi kompleksitas tugas yang tinggi dengan pengelolaan anggaran yang cukup besar, menjadikannya lokasi yang tepat untuk mempelajari implementasi strategi pengelolaan keuangan dan aset dalam kondisi operasional yang dinamis. Instansi ini juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam aktivitas administratif dan operasional yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya pemerintah daerah.

Namun, pengelolaan aset di instansi pemerintah Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan. Studi Agustin (2025) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh pegawai yang telah pensiun. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan aset daerah.

Selain itu, Febtiasari (2017) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan manajemen hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif karena masih terdapat kelemahan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini menegaskan pentingnya perbaikan kapasitas SDM dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan keuangan dan aset.

Topik mengenai pengaruh strategi pengelolaan keuangan dan aset terhadap efektivitas operasional sangat relevan dengan disiplin ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Mahasiswa akuntansi perlu memahami bagaimana anggaran disusun, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan dalam konteks pemerintahan. Lebih jauh, pengelolaan aset tetap merupakan komponen krusial dalam pelaporan keuangan pemerintah yang memerlukan pencatatan dan pengawasan yang akurat. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa dapat mengintegrasikan teori-teori akuntansi yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik riil di lapangan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana strategi yang diimplementasikan oleh BPBD Sulawesi Tengah dalam mengelola keuangan dan aset?
2. Sejauh mana strategi tersebut memberikan pengaruh terhadap efektivitas operasional BPBD?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di BPBD Sulawesi Tengah?

### **1.3. Tujuan Laporan Magang**

Laporan magang ini disusun dengan tujuan:

1. Menganalisis strategi pengelolaan keuangan dan aset yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Mengevaluasi dampak strategi tersebut terhadap efektivitas operasional BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam konteks penanggulangan bencana.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi beserta upaya penanganannya.

### **1.4. Manfaat Laporan Magang**

Laporan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi Instansi**

Menyediakan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi pengelolaan keuangan dan aset yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung operasional penanggulangan bencana.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Menjadi media pembelajaran langsung dalam memahami praktik akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset di instansi pemerintahan. Selain itu, kegiatan magang ini memperluas wawasan mahasiswa tentang tantangan riil dalam implementasi strategi pengelolaan keuangan di lapangan.

#### **3. Bagi Akademisi**

Menyajikan referensi tambahan atau studi kasus empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau riset lanjutan terkait efektivitas strategi pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintahan daerah.

## **1.5. Sistematika Penulisan Laporan**

Laporan ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang kegiatan magang, rumusan masalah yang dikaji, tujuan pelaksanaan magang, manfaat yang diharapkan, serta struktur penulisan laporan. Bagian ini juga memaparkan pentingnya topik yang dibahas dari sudut pandang akademis maupun praktis.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan kerangka teori dan konsep yang berkaitan dengan topik magang, meliputi teori pengelolaan keuangan daerah, manajemen aset, efektivitas operasional, penerapan SAP berbasis akrual, serta regulasi akuntansi sektor publik. Bagian ini juga memuat hasil riset terdahulu yang relevan sebagai dasar teori dan pembanding.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan waktu dan lokasi penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Uraian mencakup sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta gambaran umum program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mendeskripsikan aktivitas selama magang, meliputi hasil observasi, wawancara, serta analisis terhadap strategi pengelolaan keuangan dan aset yang diterapkan di BPBD. Dibahas pula pengaruh strategi tersebut terhadap efektivitas operasional instansi, serta kendala dan solusi yang dihadapi.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang menyajikan kesimpulan dari hasil analisis selama magang serta rekomendasi yang dapat diberikan kepada instansi maupun pihak terkait. Penutup juga mencakup refleksi pribadi atas pengalaman

selama magang dan saran untuk penyempurnaan laporan serupa di masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Memuat seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan laporan, baik berupa buku, jurnal, dokumen instansi, maupun peraturan perundang-undangan.

#### **LAMPIRAN**

Berisi dokumen pendukung seperti jadwal magang, dokumentasi kegiatan, surat tugas, instrumen wawancara, serta dokumen lain yang relevan.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Penulis dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Objek</b>	<b>Temuan</b>
1.	(Fitri & Handayani, 2024)	Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah	Unit pengelola keuangan di BPKAD Kota Surabaya	Ditemukan permasalahan berupa keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerapkan basis akrual secara komprehensif. Solusi yang ditempuh adalah melalui program sosialisasi dan pengembangan aplikasi E-Accounting untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan.
2.	(Tani, Manossoh, & Wokas, 2020)	Evaluasi pengelolaan akuntansi aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara	Tata kelola aset/barang milik daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara	Tata kelola akuntansi aset/barang milik daerah belum berjalan efektif secara menyeluruh karena terdapat beberapa subsistem yang belum diimplementasikan dengan optimal.

3.	(Gandawijaya dkk., 2025)	Optimalisasi efektivitas tata kelola keuangan dan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan Jahe Binangkit	Pelaku UMKM wedang Jahe Binangkit di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	Mayoritas pelaku UMKM memiliki pemahaman terbatas terhadap pencatatan keuangan usaha. Kendala utama yang dihadapi meliputi permasalahan modal, distribusi produk, dan promosi produk yang belum optimal.
----	--------------------------	--	---	--

4.	(Ridwan , 2020)	Dampak manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu	Pengelola aset tetap BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu	Aktivitas inventarisasi, legal audit, dan penilaian aset memberikan pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu.
5.	(Handayani , 2023)	Strategi manajemen pengelolaan keuangan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di perguruan tinggi swasta	Pengelola keuangan pada perguruan tinggi swasta	Masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengelolaan, antara lain kurangnya monitoring terhadap risiko dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan.

## **2.2. Strategi Pengelolaan Keuangan**

Strategi manajemen finansial dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan strategis, mekanisme operasional, dan tindakan implementatif yang diterapkan organisasi guna memastikan optimalisasi penggunaan dana dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Menurut Halim (2007), pengelolaan finansial pada sektor publik memiliki orientasi ganda: pertama, mewujudkan distribusi sumber daya yang tepat sasaran; kedua, meningkatkan standar layanan yang diberikan kepada publik. Dalam konteks Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), strategi ini mencakup penyusunan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan anggaran yang disiplin, serta penyajian laporan keuangan yang transparan.

Hasil riset Fitri dan Handayani (2024) terhadap BPKAD Kota Surabaya mengungkapkan adanya hambatan dalam penyusunan laporan finansial, terutama terkait kurangnya kapasitas pemahaman personel mengenai konsep akuntansi berbasis akrual. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan program sosialisasi dan pengembangan aplikasi *E-Accounting* guna memudahkan proses pengelolaan keuangan. Tata kelola keuangan yang strategis meliputi beberapa dimensi penting, yaitu perencanaan anggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

Keberhasilan tata kelola ini sangat menentukan efektivitas operasional lembaga, terutama dalam merespons bencana yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam alokasi dana. Dengan demikian, strategi keuangan harus berorientasi pada hasil, adaptif terhadap dinamika lapangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.

## **2.3. Strategi Pengelolaan Aset**

Manajemen aset merupakan aktivitas terstruktur yang mencakup tahapan pengembangan, pemanfaatan operasional, perawatan berkala, hingga penghapusan kekayaan organisasi dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016, administrasi

barang milik daerah pada sektor publik wajib berpedoman pada beberapa prinsip dasar, yaitu: kemanfaatan fungsional, jaminan legalitas, keterbukaan informasi, penghematan anggaran, pertanggungjawaban, serta pertimbangan nilai ekonomis.

Studi Ridwan (2020) pada BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu membuktikan bahwa tiga aktivitas utama pendataan aset, audit legalitas, serta proses valuasi memberikan kontribusi positif yang bermakna secara statistik terhadap peningkatan pemanfaatan aset tetap. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen aset yang komprehensif di lembaga pemerintahan.

BPBD sebagai lembaga pemerintah yang menangani kebencanaan memiliki aset yang bersifat kritis, seperti peralatan darurat dan armada operasional. Oleh karena itu, strategi pengelolaan aset menjadi esensial agar aset tersebut dalam kondisi siap pakai kapanpun dibutuhkan. Strategi pengelolaan aset meliputi identifikasi kebutuhan, pencatatan aset secara tertib, pemeliharaan berkala, serta penghapusan aset yang tidak produktif.

Namun, permasalahan dalam pengelolaan aset masih sering ditemui. Wokas dkk. (2020) dalam kajiannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa pengelolaan akuntansi aset belum berjalan efektif secara menyeluruh karena terdapat beberapa subsistem yang belum diimplementasikan dengan optimal. Manajemen aset yang baik mendukung operasional yang efektif serta menghindari pemborosan sumber daya.

#### **2.4. Efektivitas Operasional**

Efektivitas operasional dapat diartikan sebagai indikator pencapaian sasaran organisasi melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh resources yang dimiliki. Dalam perspektif sektor publik, efektivitas mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Mahmudi (2010) menggarisbawahi bahwa tingkat efektivitas operasional

sangat dipengaruhi oleh integrasi harmonis antara fase perencanaan program, implementasi di lapangan, serta proses evaluasi berkelanjutan.

Handayani (2023) dalam studinya tentang manajemen strategis pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi swasta menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan, antara lain minimnya pemantauan terhadap risiko dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Temuan ini relevan dengan kondisi lembaga publik yang juga membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

Di lingkungan BPBD, efektivitas operasional dapat diukur dari kecepatan tanggap darurat, ketepatan distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana. Strategi keuangan dan pengelolaan aset yang terintegrasi memainkan peran vital dalam meningkatkan efektivitas ini. Operasional yang efektif akan meminimalkan dampak bencana, mengurangi kerugian, dan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

## **2.5. Konsep dan Pengertian Pendapatan**

Dalam perspektif akuntansi, pendapatan merepresentasikan arus masuk manfaat ekonomi baik dalam bentuk kas maupun setara kas yang diperoleh entitas dari aktivitas penjualan barang, pemberian jasa, ataupun operasi bisnis inti lainnya. Sesuai regulasi SAK di Indonesia, pendapatan menggambarkan influx ekonomi dari kegiatan rutin organisasi, meliputi berbagai bentuk seperti revenue penjualan, imbalan jasa profesional, return investasi berupa dividen, kompensasi royalti, income bunga, atau penerimaan sewa (Sukran et al., 2020).

Cakupan pendapatan tidak semata-mata berupa kas yang diterima secara langsung, melainkan juga meliputi nilai dari barang atau jasa yang telah ditransfer kepada konsumen, yang pengukurannya didasarkan pada nilai wajar yang dapat diverifikasi secara objektif. Dalam penerapannya, pengakuan pendapatan dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang atau penyelesaian jasa kepada pelanggan, dengan syarat manfaat ekonomi dari transaksi tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas (Akbar et al., 2020).

Prinsip ini sejalan dengan praktik pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan, dimana kualitas laporan keuangan ditentukan oleh keandalan, relevansi, dan kemampuan untuk dibandingkan serta dipahami (Sukran et al., 2020). Pengakuan pendapatan yang tepat waktu dan akurat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan suatu organisasi.

## **2.6. Hubungan Antara Penyusutan dan Pendapatan**

Penyusutan merupakan alokasi sistematis biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Beban penyusutan ini dicatat dalam laporan laba rugi dan berfungsi mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga memengaruhi laba bersih perusahaan. Pemilihan metode penyusutan yang tepat sangat penting untuk mencerminkan kondisi keuangan yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Strategi pengelolaan keuangan dan aset saling berkaitan dalam mendukung efektivitas operasional organisasi publik. Perencanaan keuangan yang baik memungkinkan alokasi dana yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, sementara pengelolaan aset yang optimal memastikan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana operasional.

Ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan atau aset dapat menimbulkan inefisiensi dan menurunkan kinerja operasional. Gandawijaya dkk. (2025) dalam penelitiannya pada UMKM Jahe Binangkit menemukan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki pemahaman terbatas terhadap pencatatan keuangan usaha, dan permasalahan permodalan masih menjadi kendala utama. Hal serupa juga dapat terjadi pada organisasi publik jika tidak ada sistem pengelolaan yang memadai. Oleh karena itu, integrasi antara kedua strategi ini menjadi kunci dalam pencapaian tujuan lembaga, khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam.

## **2.7. Penilaian Pendapatan dan Estimasi Penyusutan**

Penilaian pendapatan dan estimasi penyusutan melibatkan penentuan nilai perolehan aset, estimasi umur manfaat, dan nilai residu. Metode penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset tersebut. Estimasi yang akurat memastikan penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

## **2.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Operasional**

Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas operasional antara lain:

1. Ketersediaan anggaran : Kecukupan dan ketepatan waktu pencairan dana berpengaruh pada kelancaran kegiatan operasional.
2. Kondisi aset : Kualitas dan kesiapan peralatan serta sarana pendukung sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana.
3. Kapasitas SDM : Kompetensi dan pengalaman dalam mengelola anggaran dan aset menjadi faktor krusial, sebagaimana ditemukan oleh Fitri dan Handayani (2024) bahwa kurangnya pemahaman SDM dapat menghambat implementasi sistem akuntansi.
4. Sistem informasi dan pelaporan  
Keandalan data dan informasi mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

## **2.9. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Publik**

Dalam pengelolaan keuangan dan aset publik, prinsip akuntabilitas dan transparansi harus menjadi landasan utama. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan aset kepada publik dan otoritas terkait, sedangkan transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan kepada pihak berkepentingan.

Penerapan prinsip ini akan mendorong kepercayaan publik terhadap kinerja BPBD serta memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit internal dan eksternal,

serta pelaporan yang sistematis menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip ini.

#### **2.10. Kewajiban Pelaporan dan Audit**

Organisasi wajib menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan secara wajar, termasuk pengungkapan informasi mengenai aset tetap dan penyusutannya. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini independen mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan, termasuk kebijakan penyusutan yang diterapkan. Prosedur audit mencakup pemeriksaan dokumentasi aset, verifikasi perhitungan penyusutan, dan evaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Lembaga publik seperti BPBD wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja yang memuat informasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset. Evaluasi atas laporan ini dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian sasaran serta untuk identifikasi kendala dan peluang perbaikan.

Pelaporan yang baik akan mendukung proses audit dan perencanaan anggaran berikutnya. Selain itu, evaluasi kinerja memungkinkan perbaikan strategi dan peningkatan efektivitas operasional di masa mendatang. Dengan mengintegrasikan seluruh aspek di atas, BPBD diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas kelembagaan dalam menghadapi bencana dan memberikan pelayanan publik yang responsif, tepat, dan efisien.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif guna menyajikan representasi yang terstruktur, berbasis fakta, serta presisi tinggi terhadap objek penelitian. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang dianalisis secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan objektif. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Pakaya dkk. (2024) yang menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner dan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan.

### **3.2. Populasi Dan Sampel**

#### **3.2.1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan anggota kelompok yang menjadi sasaran kesimpulan penelitian (Fadilah dkk, 2023). Dalam studi ini, populasi mencakup seluruh pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Penentuan populasi ini sejalan dengan Fitri dan Handayani (2024) yang menjadikan pegawai pengelola keuangan di BPKAD Kota Surabaya sebagai populasi untuk menganalisis peran lembaga dalam penyajian laporan keuangan daerah.

#### **3.2.2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Penentuan sampel mempertimbangkan beberapa aspek seperti permasalahan penelitian, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen yang digunakan (Purwanza, 2020).

Penelitian ini berfokus pada pengaruh strategi pengelolaan keuangan dan aset terhadap efektivitas operasional, sehingga sampel

penelitian adalah pegawai BPBD Sulawesi Tengah yang bertugas pada bagian keuangan dan aset yang diambil secara *purposive* sesuai dengan keterlibatannya dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan tugas BPBD.

Teknik *purposive sampling* ini juga diterapkan oleh Ridwan (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

### **3.3. Sumber Data**

**Sumber data penelitian terdiri dari dua kategori:**

1. Data Primer: Diperoleh langsung melalui kuesioner kepada staf dan kepala sub bagian keuangan dan aset, sejalan dengan metode Tani, Manossoh, dan Wokas (2020).
2. Data Sekunder: Data pendukung dari literatur dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur: Pengumpulan informasi dari buku, jurnal ilmiah, dan arsip BPBD sebagai landasan pemecahan masalah.
2. Observasi Lapangan: Pengamatan dan wawancara langsung mengenai strategi pengelolaan keuangan dan aset.
3. Kuesioner: Instrumen dengan 3 variabel menggunakan skala Likert untuk mengukur pengaruh pengelolaan keuangan dan aset terhadap efektivitas operasional.

**Tabel 3. 1 Skala Likert**

<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Data Primer, 2025

**Tabel 3. 2 Interpretasi Nilai**

<b>Rentang Skor</b>	<b>Interpretasi</b>
6–10	Sangat Kurang Baik
11–15	Kurang Baik
16–20	Cukup Baik
21–25	Baik
26–30	Sangat Baik

Sumber: Data Primer, 2025

### **3.5. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, dimana peneliti memanfaatkan angka untuk menjawab fenomena yang muncul disertai penjelasan naratif. Proses analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta uji hipotesis. Metode ini selaras dengan penelitian Addila, Mattoasi, dan Pakaya (2024) yang menggunakan regresi linear berganda untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP di BPBD Provinsi Gorontalo.

## **BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG**

### **4.1. Profil Lokasi Magang**

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah adalah institusi pemerintahan daerah yang berperan sebagai koordinator dan pelaksana sistem manajemen kebencanaan di wilayah yuridiksi Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan operasional lembaga ini berpedoman pada *framework* regulatif dan panduan teknis yang ditetapkan BNPB sebagai institusi di tingkat nasional. Lembaga ini mengemban fungsi strategis dalam merespons kondisi emergensi kebencanaan di berbagai lokasi, dengan cakupan tugas utama yang meliputi: upaya pengurangan risiko, kesiapsiagaan prabencana, respons pada fase tanggap darurat, serta pelaksanaan program pemulihan dan pembangunan kembali kawasan terdampak (Apriawan et al., 2016). Penelitian Awusi, Nayoan, dan Tompodung (2018) menunjukkan bahwa kinerja BPBD sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga dan kesiapan sumber daya dalam menghadapi bencana.



**Gambar 4. 1 Lokasi Magang**

Nama : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi  
Perusahaan : Sulawesi Tengah  
Alamat : Jl. M.T Haryono. No.29, Besusu Tengah, Kec. Palu Timur.,  
Kota Palu, Sulawesi Tengah  
Kode Pos : 94118  
No. telepon : (0451) 421766  
*WebSite* : <https://www.bpbd.sultengprov.go.id/>  
*E-Mail* : [bpbdsulteng@gmail.com](mailto:bpbdsulteng@gmail.com)

#### **4.1.1. Sejarah BPBD**

Amanat konstitusional yang tertuang dalam preambule UUD 1945 paragraf keempat dengan tegas menyatakan tanggung jawab negara dalam memberikan proteksi komprehensif bagi seluruh warga negara dan keutuhan wilayah NKRI. Mandat tersebut merepresentasikan komitmen dasar pemerintah untuk menghadirkan jaminan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keamanan, termasuk perlindungan dari risiko kebencanaan. Dalam rangka mengimplementasikan perlindungan tersebut, diperlukan pembangunan karakter bangsa yang memiliki tingkat kesadaran tinggi serta ketangguhan dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko kebencanaan (CALK, 2024).

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Institusi ini mengambil peran strategis dan tanggung jawab signifikan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan strategis penanggulangan bencana di wilayah yuridiksinya. Mengingat frekuensi dan intensitas kejadian bencana yang relatif tinggi, paradigma kebijakan penanggulangan bencana telah mengalami transformasi fundamental, dari

pendekatan yang bersifat reaktif dan responsif menjadi pendekatan yang lebih proaktif dan preventif. Pergeseran ini juga mencakup perubahan dari pendekatan sektoral menuju pendekatan multi-sektoral yang lebih komprehensif, dari inisiatif yang didominasi pemerintah menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, dari sistem yang tersentralisasi menuju sistem yang terdesentralisasi, serta dari fokus pada tanggap darurat menuju prioritas pada pengurangan risiko bencana (Manullang & Maesaroh, 2019).

Transformasi konseptual dalam manajemen kebencanaan telah diformalkan melalui UU No. 24 Tahun 2007 yang mengatur Penanggulangan Bencana, diperkuat dengan PP No. 21 Tahun 2008 sebagai aturan pelaksanaannya. Transformasi ini sejalan dengan penelitian Addila, Mattoasi, dan Pakaya (2024) yang menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam implementasi standar pengelolaan bencana di tingkat daerah.

#### **4.1.2. Kerangka Regulasi dan Landasan Hukum**

Implementasi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sistem manajemen kebencanaan di wilayah regional berpijak pada sejumlah regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dasar hukum yang menjadi pedoman operasional mencakup:

1. Sulawesi Tengah 2011-2017
2. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Pembangunan
5. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Pembangunan
6. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

7. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pembiayaan dan Manajemen Bantuan Bencana
8. PP No. 23 Tahun 2008 tentang Partisipasi Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
9. Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015
11. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
12. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
13. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana
15. Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2017

Rangkaian regulasi di atas konsisten dengan temuan Angraini (2025) yang menggarisbawahi urgensi fondasi hukum yang solid dalam eksekusi program rehabilitasi sosial pascabencana. Hal serupa juga dikemukakan oleh Febtiasari dalam kajiannya mengenai penerapan kebijakan manajemen di instansi pemerintahan daerah Sulawesi Tengah, yang menegaskan bahwa kejelasan landasan hukum menjadi prasyarat efektivitas implementasi kebijakan.

#### **4.1.3. Visi dan Misi BPBD**

##### **1. Visi**

Visi merupakan proyeksi kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh organisasi di masa mendatang, yang menggambarkan cita-cita dan aspirasi

institusi. Mengacu pada visi Gubernur Sulawesi Tengah untuk periode kepemimpinan 2021-2026 dengan tema "**Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera**", serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD periode 2021-2026, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan visi organisasinya sebagai berikut: "**Mewujudkan sistem manajemen kebencanaan yang sistematis dan komprehensif**"

Visi ini mencerminkan komitmen organisasi untuk melaksanakan pengelolaan bencana yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, sejalan dengan penelitian Manullang dan Maesaroh (2019) mengenai efektivitas organisasi penanggulangan bencana.

## 2. Misi

Misi organisasi merupakan penjabaran operasional dari visi yang telah ditetapkan, berupa serangkaian agenda strategis yang harus diimplementasikan oleh institusi pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Keberadaan pernyataan misi memungkinkan seluruh komponen organisasi dan stakeholder terkait untuk memahami secara komprehensif mengenai eksistensi dan kontribusi institusi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam rangka merealisasikan visi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, telah dirumuskan enam (6) poin misi strategis sebagai berikut:

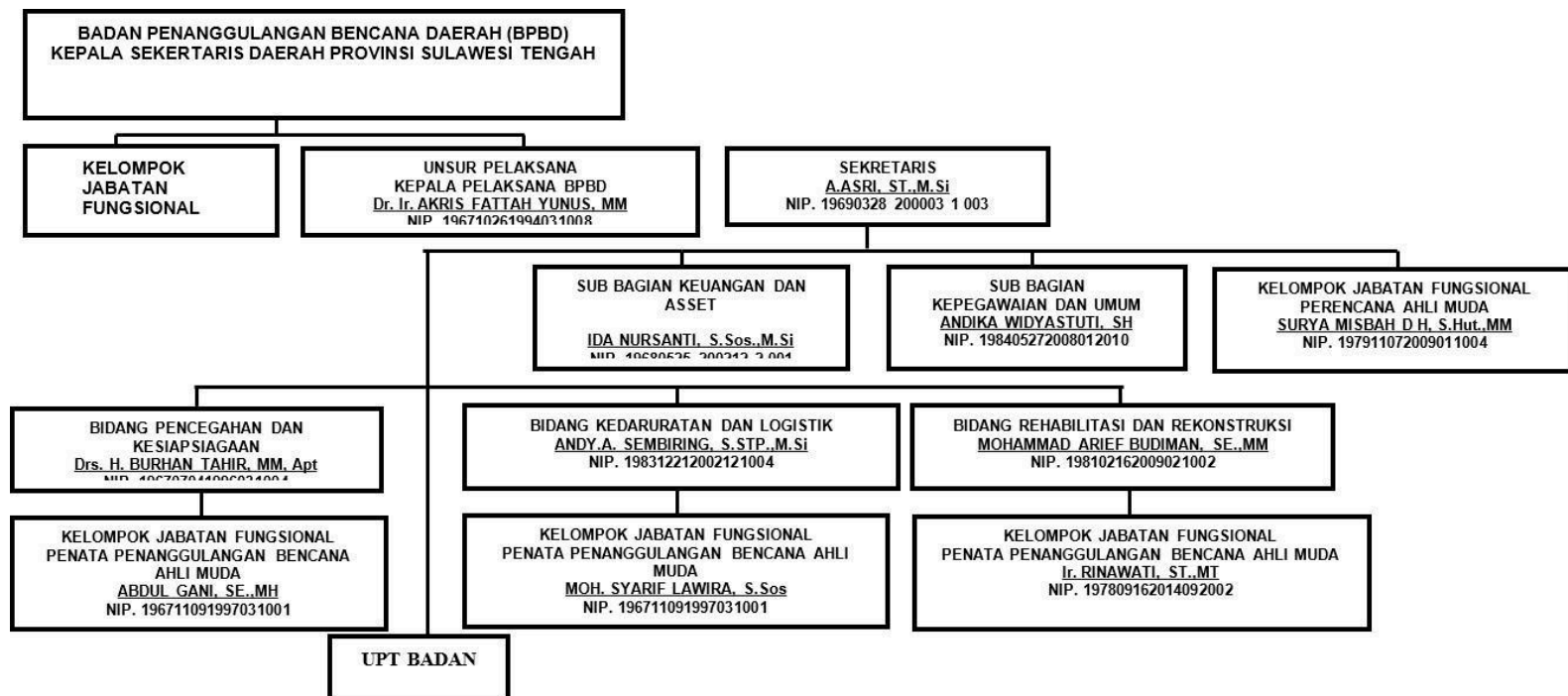
- a. Menghadirkan perlindungan wilayah regional dari beragam potensi ancaman kebencanaan melalui penerapan pendekatan pengurangan risiko yang holistik
- b. Membangun infrastruktur sistem manajemen kebencanaan daerah yang kredibel, efisien, dan profesional didukung oleh resources yang mencukupi
- c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi mitra pemerintah, serta sektor swasta dan dunia usaha
- d. Melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan antisipasi terhadap berbagai potensi dan ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana, baik

yang bersumber dari fenomena alam, aktivitas industrialisasi, konflik sosial, dinamika ekonomi, dampak globalisasi, maupun arus informasi

- e. Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial kemasyarakatan, mengembangkan prakarsa serta mendorong peran aktif masyarakat melalui pola kemitraan strategis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah, sejalan dengan penelitian Tani, Manossoh, dan Wokas (2020) mengenai pengelolaan aset dalam konteks pemerintahan daerah
- f. Menyelenggarakan sistem penanggulangan bencana daerah secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat
- g. Keenam misi ini dirancang untuk menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Sukran, Rajindra, dan Yusuf (2020) mengenai kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Sulawesi Tengah.

#### 4.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan regulasi daerah, komposisi organisasional BPBD terdiri atas tiga unsur utama, yaitu Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Struktur organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Kepala BPBD yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua, Unsur Pengarah yang mencakup perangkat daerah terkait penanggulangan bencana serta unsur masyarakat seperti pakar, profesional, dan tokoh masyarakat. Ketiga, Unsur Pelaksana yang berada di bawah kepemimpinan Kepala Pelaksana, dengan dukungan sekretariat serta bidang-bidang operasional yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing bidang menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi yang telah ditetapkan.

## **4.2. Aktivitas Magang**

### **4.2.1 Bentuk Kegiatan**

Aktivitas magang difokuskan pada bidang Keuangan dan Aset yang memiliki tanggung jawab terhadap administrasi aset masuk dan keluar, pengelolaan penggajian, serta prosedur peminjaman barang. Selain itu, bidang ini juga melakukan pencatatan rutin kepegawaian setiap bulan untuk memastikan jumlah karyawan aktif serta mengelola administrasi BPJS. Pengelolaan keuangan dan aset di instansi pemerintahan daerah merupakan komponen penting dalam mendukung efektivitas operasional (Sukran *et al.*, 2020).

### **4.2.2 Tempat dan Waktu Kegiatan**

Hari	:	Senin s.d Jumat
Durasi	:	4 Bulan
Tanggal	:	24 Maret 2025 s.d 24 Juli 2025
Tempat	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Bidang Magang	:	Keuangan dan Aset

### 4.2.3 Data Peserta

Sebagai pelaksana dalam Magang ini adalah

Nama	:	Ichfa Farida Ramadhani
NIM	:	21312289
Program Studi	:	S1 Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia.
Semester	:	VIII (Delapan)
Nomor HP	:	082238846853
Email	:	<u><a href="mailto:21312289@students.uii.ac.id">21312289@students.uii.ac.id</a></u>

### 4.3. Kegiatan magang

Pelaksanaan Program Tugas Akhir berlangsung dalam rentang waktu empat bulan, terhitung sejak 24 Maret 2025 hingga 24 Juli 2025. Program tersebut menjadi komponen mandatory dalam kurikulum akademik yang bertujuan mengintegrasikan pengetahuan konseptual dari proses pembelajaran dengan pengalaman implementatif di dunia kerja riil. Dalam konteks ini, penulis melaksanakan kegiatan magang di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebelum kegiatan magang dimulai secara resmi, penulis melakukan berbagai persiapan yang bersifat administratif maupun substantif. Persiapan tersebut mencakup pencarian dan pengumpulan informasi yang relevan dan komprehensif mengenai struktur organisasi, cakupan tugas, fungsi, serta operasionalisasi kerja di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan agar penulis memiliki pemahaman awal mengenai konteks institusi tempat magang serta mampu mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan dinamika kerja yang akan dihadapi.

Pada hari pertama pelaksanaan magang tanggal 24 Maret 2025, penulis diterima dengan baik oleh pihak BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada hari tersebut, penulis mengikuti kegiatan orientasi institusi dan pembekalan awal yang disampaikan oleh pihak instansi. Pembekalan tersebut meliputi pengenalan terhadap struktur organisasi, fungsi masing-masing bagian, serta penjelasan mengenai lingkungan kerja dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, penulis juga diperkenalkan secara langsung kepada seluruh pegawai serta para mentor yang akan membimbing dan mengarahkan selama masa pelaksanaan magang.

Orientasi terhadap lingkungan kerja dan budaya organisasi menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembekalan ini. Penulis diberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungan kerja BPBD, termasuk etika kerja, kedisiplinan, profesionalisme, serta semangat kolaboratif antar sesama pegawai. Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan (Addila et al., 2024).

Selanjutnya, penulis juga memperoleh penjelasan terkait sistem jam kerja yang berlaku di instansi tersebut. Secara umum, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan sistem lima hari kerja dalam sepekan, yaitu mulai hari Senin hingga Jumat, dengan jam operasional dimulai pukul 08.00 WITA dan berakhir pada pukul 16.00 WITA.

Adapun pada hari Sabtu, instansi tetap melakukan aktivitas kerja dengan jam operasional dari pukul 08.30 WITA hingga 16.30 WITA. Penjelasan mengenai sistem kerja ini menjadi dasar penting bagi penulis untuk mengatur waktu dan menyesuaikan ritme kerja selama masa magang berlangsung. Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan kerja, penulis juga dibekali dengan pengetahuan mengenai prosedur keamanan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kantor. Pihak instansi menyampaikan secara jelas mengenai standar keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai maupun peserta magang, termasuk ketentuan mengenai kedisiplinan, penggunaan fasilitas kantor, serta aturan berpakaian dan berperilaku selama berada di lingkungan kerja.

Selain pembekalan umum, penulis juga menerima penjelasan mengenai tugas pokok dan tanggung jawab yang akan dijalankan selama mengikuti program magang. Hal ini meliputi aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, serta keterlibatan dalam proses penyusunan laporan keuangan instansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Penugasan tersebut diberikan secara bertahap dan terstruktur, dengan pendampingan dari mentor yang telah ditunjuk oleh pihak instansi.

Dengan adanya pembekalan yang komprehensif tersebut, penulis merasa memiliki fondasi yang kuat untuk dapat beradaptasi dan berkontribusi secara optimal dalam mendukung kegiatan operasional di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Pembekalan ini juga memberikan bekal yang signifikan dalam pengembangan kompetensi profesional, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik serta pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, tahap awal pelaksanaan magang ini menjadi momen penting dalam proses transisi dari dunia akademik ke dunia kerja. Penulis berharap bahwa pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan magang dapat memberikan nilai tambah, baik bagi perkembangan pribadi maupun sebagai bahan refleksi dalam penyusunan laporan tugas akhir yang lebih komprehensif dan berbobot.

Pada bulan selanjutnya, pembelajaran yang diberikan oleh instansi mengarahkan pada pemilihan topik penelitian berjudul "Pengaruh Strategi Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap Efektivitas Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah". Pemilihan topik ini didasarkan pada latar belakang pengalaman dan pengamatan penulis selama menjalani kegiatan magang di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Selama masa magang, khususnya pada bulan pertama pelaksanaan, penulis secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan instansi, seperti membantu dalam proses revisi nama tim honorarium dan melakukan verifikasi atas dokumen laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD). Melalui keterlibatan tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem administrasi keuangan, alur pelaporan, serta dinamika internal dalam pengelolaan anggaran dan aset.

Salah satu hal yang menarik perhatian penulis selama menjalani magang adalah pentingnya strategi yang matang dalam mengelola keuangan dan aset daerah untuk mendukung efektivitas operasional suatu instansi, khususnya BPBD yang memiliki tanggung jawab besar dalam penanggulangan bencana. Penulis mengamati bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di BPBD tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang tersedia, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana strategi pengelolaan keuangan dan aset yang diterapkan dapat dijalankan secara konsisten, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas. Efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal menjadi indikator penting dalam menilai kinerja instansi pemerintah daerah (Akbar *et al.*, 2020).

Selain itu, dalam konteks instansi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset harus disesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Strategi yang tertuang dalam dokumen Renstra menjadi pedoman dalam merumuskan prioritas anggaran, distribusi sumber daya, serta pengelolaan aset yang mendukung pelaksanaan program kerja secara keseluruhan (Febtiasari, 2017). Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut apakah strategi yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Renstra berjalan telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas operasional instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penulis juga mempertimbangkan pentingnya kontribusi akademik yang dapat diberikan melalui penelitian ini. Pengelolaan keuangan dan aset di sektor publik, khususnya pada lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan, merupakan isu yang sangat krusial mengingat kebutuhan akan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran yang semakin meningkat.

Dengan meneliti topik ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara perencanaan strategis dengan pencapaian kinerja operasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BPBD.

Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan strategi pengelolaan keuangan dan aset di masa mendatang. Melalui hasil penelitian, instansi dapat memperoleh masukan yang berbasis data dan analisis mengenai efektivitas kebijakan serta implementasi strategi keuangan dan aset yang telah dijalankan. Hal ini tentunya akan sangat berguna dalam upaya meningkatkan Manajemen keuangan dan aset yang efektif merupakan pilar fundamental dalam merealisasikan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam sistem administrasi pemerintahan. Pengelolaan aset daerah yang efektif juga memerlukan partisipasi dan tindakan tegas dari pihak berwenang (Agustin, 2025).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, baik dari pengalaman empiris selama magang, urgensi akademik, maupun kontribusi praktis, penulis meyakini bahwa topik "Pengaruh Strategi Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap Efektivitas Operasional BPBD Sulawesi Tengah" merupakan pilihan yang tepat dan relevan untuk diangkat sebagai fokus dalam penyusunan laporan tugas akhir.

Secara keseluruhan, pengalaman magang selama empat bulan dimulai pada bulan Maret hingga Juli memberikan penulis wawasan yang mendalam tentang proses administrasi keuangan, keterampilan teknis yang diperlukan dalam mengelola data aset dan keuangan, keterampilan membuat surat keluar, surat masuk, dan SK, serta kemampuan analisis yang penting dalam pembuatan laporan keuangan BPBD. Selain itu, untuk mengelola

perjalanan kegiatan magang agar lebih sistematis, maka dibuatlah tabel timeline kegiatan magang.

Tabel 4.1 berikut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai setiap tahapan dalam kegiatan magang dengan menyajikan informasi yang terstruktur.

**Tabel 4. 1 Kegiatan Harian**

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hasil</b>
24-27 Maret 2025	Orientasi sistem kerja dan jam operasional	Penyesuaian waktu kerja dan pengenalan deskripsi pekerjaan masing-masing pegawai	Mampu menyesuaikan diri dengan jadwal kantor dan mengetahui deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan
08-11 April 2025	Orientasi lingkungan kerja dan pembekalan serta pengenalan sistem komputer kantor yang berisi beberapa SK untuk keperluan administrasi	Belum memahami struktur organisasi dan belum mengetahui format penulisan surat keterangan yang dibutuhkan untuk administrasi kantor	Memahami struktur dan budaya kerja BPBD serta sudah mengetahui cara membuat surat keterangan untuk kebutuhan penandatanganan gaji atau perubahan aset
21-25 April 2025	Pengurusan verifikasi laporan keuangan, pengecekan kembali laporan keuangan yang sudah dibuat sebelumnya, mengecek hasil laporan perjalanan dinas apakah nilainya sudah sesuai dengan yang dibuat, kemudian finalisasi data	Untuk memastikan bahwa laporan yang disajikan tidak ada nilai yang berubah atau salah	Mengetahui isi catatan atas laporan keuangan 2024 untuk dijadikan sebagai data laporan magang



<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hasil</b>
28 April-2 Mei 2025	Membuat tanda terima dokumen pengembalian dari BPKAD dan mengantarkan dokumen pengembalian ke masing-masing bidang, mengantarkan penandatanganan gaji ke masing-masing ruangan	Belum mengetahui sistem pengembalian dokumen bahwa setiap ada dokumen yang diterima atau diberikan harus dibuatkan surat tanda terima dan tanda pengembalian untuk arsip surat agar tidak terjadi kehilangan dokumen atau berkas penting instansi	Mengetahui sistem kerja dokumen keluar dan dokumen masuk serta mengetahui beberapa aturan yang harus dilakukan sebelum mengembalikan, mengantarkan atau membuat dokumen ke masing-masing bidang
3-9 Mei 2025	Mengarsip surat yang masuk ke kantor dan surat yang sudah dikeluarkan oleh bidang keuangan dan aset ke dalam dokumen pengarsipan	Belum mengetahui blok-blok tempat pengarsipan surat di kantor	Mengetahui cara mengarsip dan meletakkan arsipan keuangan dan aset tersebut sesuai dengan blok-blok yang sudah ditunjukkan oleh mentor di kantor BPBD Sulawesi Tengah
14-16 Mei 2025	Membantu mentor melakukan scan beberapa dokumen untuk dijadikan soft file sehingga dapat dikirimkan melalui WhatsApp kepada kepala pelaksana	Diajarkan untuk men-scan dokumen untuk kebutuhan pengarsipan atau pengiriman data melalui online	Sudah lancar ketika diminta untuk mengirimkan data atau mengarsipkan data ke dokumen laptop

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hasil</b>
17-20 Mei 2025	Menyelesaikan proposal magang	Proposal magang belum selesai dikarenakan data yang dikumpulkan belum cukup untuk menyelesaikan proposal magang	Proposal magang dapat diselesaikan di minggu berikutnya setelah data yang dibutuhkan sudah lengkap
21-23 Mei 2025	Berangkat ke BPKAD untuk pengembalian pinjaman daerah	Belum mengetahui cara pengembalian pinjaman	Mengetahui mekanisme peminjaman daerah
24-28 Mei 2025	Update data karyawan penerima BPJS karena ada beberapa karyawan yang keluar dan BPJS-nya belum dihapus dari kantor	Belum mengetahui bahwa hal tersebut tidak terotomatisasi di sistem kantor, dan harus dihapus secara manual	Mengetahui bahwa setiap ada yang keluar penerima BPJS harus dihapuskan dan di-update di sistem kantor
10-13 Juni 2025	Membuat laporan	Laporan yang dibuat belum sepenuhnya selesai	Laporan yang dibuat telah dilanjutkan
16-20 Juni 2025	Membersihkan, mengatur dan memindahkan kemudian memilah surat keluar dan masuk beserta SPJ mulai dari tahun 2021 hingga 2024 untuk diatur kembali agar tidak tercecer	Banyaknya dokumen penting yang tercampur dan tercecer di ruangan	Dokumen yang berada di ruangan hanya ada data yang digunakan setiap tahun, data tahun 2024 dan 2025
23-27 Juni 2025	Terima surat koordinasi rencana pembentukan forum pengurangan risiko bencana BPBD provinsi.	Belum mengetahui bahwa pembentukan forum harus disetujui oleh pihak BPBD provinsi	Mengetahui bahwa pengesahan tersebut harus disetujui BPBD provinsi

30 Juni-4 Juli 2025	Menyetorkan surat perjanjian hibah kepada kepala pelaksana	Belum mengetahui seperti apa isi surat perjanjian hibah daerah	Mengetahui isi surat perjanjian hibah daerah
------------------------	---	---	---

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hasil</b>
7-11 Juli 2025	Menyampaikan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sulawesi Tengah atas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024	Belum mengetahui adanya daftar temuan dan tindak lanjut pemeriksaan BPK	Mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana daerah untuk masing-masing OPD
14-18 Juli 2025	Membuat surat balasan pernyataan persentase pemakaian dana belanja daerah	Perlu mengonfirmasi kembali dana belanja	Mengetahui bahwa dana daerah tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada yang bersangkutan
21-25 Juli 2025	Mencetak detail pembayaran PPN Dalam Negeri kemudian melampirkan tanda terima bukti penerimaan negara	Belum mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran PPN dalam negeri	Sudah mengetahui mekanisme pembayaran PPN dalam negeri

#### **4.4 Hasil dan Pembahasan**

##### **4.4.1.Strategi Pengelolaan Keuangan**

Anggaran daerah pada dasarnya merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Optimalnya pelaksanaan fungsi pemerintah daerah sangat bergantung pada tersedianya sumber-sumber keuangan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebagai

bagian dari pemerintah daerah, BPBD juga menerapkan strategi pengelolaan keuangan melalui penyusunan struktur anggaran tahun 2024 yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Strategi Pengelolaan Keuangan**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
Belanja Daerah	Rp87.274.819.077	Rp77.985.825.512	Rp9.288.993.565
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp14.137.424.613	Rp12.675.909.818	Rp1.641.514.795
Program Penanggulangan Bencana	Rp73.137.394.464	Rp65.309.915.694	Rp7.827.478.770
Surplus/Defisit	Rp87.274.819.077	Rp77.985.825.512	Rp9.288.993.565

Pada tahun 2024, realisasi keuangan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mencakup dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahann Daerah senilai Rp 12.675.909.818 dan Program Penanggulangan Bencana senilai Rp 65.309.915.694. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan di tahun 2024. Pengelolaan anggaran yang efektif merupakan faktor kunci dalam mendukung operasional lembaga pemerintahan (Akbar *et al.*, 2020). Berikut rincian anggaran program dan kegiatan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Tabel 4. 3 Rincian Straregi Pengelolaan Keuangan**

<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Terealisasi</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>14.137.424.613</b>	<b>12.675.909.818</b>	<b>90%</b>
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.116.612	328.141.999	96%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.932.120.565	10.520.071.092	88%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	677.847.000	672.568.736	99%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.649.543	567.930.203	99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.217.180	145.121.400	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.475.900	348.679.870	94%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.997.812	93.396.518	97%
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>73.137.394.464</b>	<b>65.309.915.694</b>	<b>89%</b>
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	73.088.150	67.304.900	92%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	7.717.120.270	7.683.081.062	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	52.871.002.453	52.840.292.640	100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12.476.183.590	4.719.237.092	38%

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (Sukran *et al.*, 2020).

#### 4.4.1 Strategi Pengelolaan Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan dari aset tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial di masa mendatang bagi BPBD maupun masyarakat. Aset ini dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup pula sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk pelayanan publik, termasuk aset yang dipertahankan karena nilai historis dan budayanya. Strategi pengelolaan aset di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui pencatatan dan pendataan aset yang mencakup aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Pengelolaan aset daerah yang optimal memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis (Agustin, 2025). Rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2024 disajikan pada bagian berikut.

**Tabel 4. 4 Klasifikasi Aset**

<b>Uraian</b>	<b>Rincian Aset</b>
Aset Lancar	Rp931.424.253
Aset Tetap	Rp19.649.809.913
Harga Perolehan	Rp41.393.644.208
Akumulasi Penyusutan	Rp21.743.834.295
Aset Lainnya	Rp885.538.850
<b>Jumlah Total Aset</b>	<b>Rp21.466.773.016</b>

Jumlah aset yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mencapai Rp 21.466.773.016. Aset tetap merupakan komposisi penyusun terbesar dengan nilai Rp 19.649.809.913, sedangkan aset lancar

merupakan komposisi terkecil sebesar Rp 931.424.253 dan aset lainnya sebesar Rp 885.538.850.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memenuhi kriteria sesuai kebijakan akuntansi dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset ini mencerminkan kekayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap per 31 Desember 2024 disajikan berdasarkan metode harga perolehan. Adapun rincian aset tetap BPBD Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 5 Rincian Aset tetap**

<b>Uraian</b>	<b>Rincian Aset</b>
Aset Lancar	Rp931.424.253
Aset Tetap	Rp19.649.809.913
Harga Perolehan	Rp41.393.644.208
Akumulasi Penyusutan	Rp21.743.834.295
Aset Lainnya	Rp885.538.850
<b>Jumlah Total Aset</b>	<b>Rp21.466.773.016</b>
Total Nilai Harga Perolehan	Rp41.393.644.208
<b>Total Nilai Buku Aset</b>	<b>Rp19.649.809.913</b>

Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat mutasi penambahan nilai perolehan mencapai Rp 1.026.666.900. Penambahan ini bersumber dari peningkatan nilai aset tetap kategori Peralatan dan Mesin senilai Rp 1.026.666.900. Di sisi lain, aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan tidak menunjukkan perubahan nilai dibandingkan periode sebelumnya. Akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan senilai Rp 3.919.851.869 yang disebabkan oleh beban penyusutan aset tetap pada periode berjalan, sehingga total akumulasi penyusutan aset tetap pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 21.743.834.295. Pengelolaan aset tetap yang efektif menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana ditekankan dalam penelitian Agustin

(2025) mengenai pentingnya pengelolaan aset daerah yang optimal untuk mendukung operasional pemerintahan. Pola pengelolaan aset ini sejalan dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang menekankan pentingnya pencatatan dan penilaian aset secara akurat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sukran *et al.*, 2020). Metode harga perolehan yang digunakan dalam penilaian aset tetap BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mencerminkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang konsisten dan dapat diandalkan.

#### **4.4.2 Identifikasi Hasil Kuisisioner**

Guna memahami tingkat kontribusi dari setiap variabel penelitian, peneliti melakukan distribusi instrumen kuisisioner yang terbagi dalam tiga segmen utama, mencakup aspek pengelolaan keuangan (X1), pengelolaan aset (X2), serta efektivitas operasional (Y). Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai yang bertugas di kantor BPBD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai responden. Berdasarkan aktivitas pengumpulan data tersebut, berhasil dihimpun informasi dari sejumlah 17 responden yang kemudian ditelaah menggunakan prosedur pengujian statistik.

#### **4.4.3 Hasil Uji Validitas**

Dalam rangka memastikan kelayakan data yang dipergunakan, dilakukan pengujian melalui aplikasi SPSS dengan prinsip dasar membandingkan nilai r hitung (koefisien korelasi hasil perhitungan) terhadap nilai r Tabel (koefisien dari tabel distribusi standar). Apabila nilai r hitung menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan r tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan memenuhi kriteria validitas, sebaliknya jika nilai r hitung lebih rendah, instrumen dianggap tidak valid.

Mengacu pada jumlah responden sebanyak  $n=17$  dengan tingkat signifikansi 5% pada distribusi nilai r tabel statistik menggunakan derajat kebebasan  $df=n-2$ , diperoleh nilai r tabel senilai 0,482 sebagaimana tertera

dalam lampiran. Ringkasan hasil pengujian validitas tersaji pada Tabel 4.6 di bawah ini:

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas**

<b>Variable</b>	<b>rhitung</b>	<b>rtable</b>	<b>Keterangan</b>
X1.1	0.493	0.482	Valid
X1.2	0.598	0.482	Valid
X1.3	0.612	0.482	Valid
X1.4	0.610	0.482	Valid
X1.5	0.722	0.482	Valid
X1.6	0.726	0.482	Valid
X2.1	0.728	0.482	Valid
X2.2	0.730	0.482	Valid
X2.3	0.750	0.482	Valid
X2.4	0.790	0.482	Valid
X2.5	0.770	0.482	Valid
X2.6	0.765	0.482	Valid
Y1	0.785	0.482	Valid
Y2	0.803	0.482	Valid
Y3	0.792	0.482	Valid
Y4	0.906	0.482	Valid
Y5	0.803	0.482	Valid
Y6	0.805	0.482	Valid

Temuan dari pengujian validitas memperlihatkan bahwa keseluruhan butir pertanyaan pada variabel X1 (pengelolaan keuangan), X2 (pengelolaan aset), maupun Y (efektivitas operasional) menghasilkan nilai rhitung (koefisien korelasi hasil komputasi) yang melampaui nilai rTabel = 0,482 (koefisien berdasarkan tabel distribusi standar). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian telah memenuhi persyaratan validitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Addila, Mattoasi, dan Pakaya (2024) yang menekankan pentingnya validitas instrumen dalam mengukur implementasi kebijakan di instansi pemerintahan.

#### 4.4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas umumnya bertujuan mengevaluasi tingkat konsistensi instrumen kuisisioner. Bila pengukuran menggunakan kuisisioner dilaksanakan secara berulang, maka instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang konsisten. Nilai koefisien reliabilitas berkisar pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilai koefisien menandakan semakin tinggi pula tingkat keandalan instrumen pengukuran. Dalam kajian ini, apabila nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan angka lebih dari 0,60, maka instrumen tersebut dikategorikan reliabel. Hasil pengujian yang telah dilaksanakan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b>Jumlah Item</b>	<b>Batas Toleransi <i>Cronbach Alpha</i></b>	<b>Status</b>
X1	0,693	6	0,6	Reliabel
X2	0,838	6	0,6	Reliabel
Y	0,863	6	0,6	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel X1 (pengelolaan keuangan), X2 (pengelolaan aset), dan Y (efektivitas operasional) dengan menggunakan model *Cronbach's Alpha*, diperoleh kesimpulan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Temuan ini konsisten dengan standar kualitas instrumen penelitian yang digunakan pada instansi pemerintahan, sebagaimana dikemukakan dalam studi Sukran, Rajindra, dan Dicky Yusuf (2020) mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.4.5 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara

simultan (uji F) maupun parsial (uji t). Analisis ini juga berfungsi untuk membentuk model prediksi dan mengukur kontribusi variabel independen melalui koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji regresi linear**

Variabel			Model Persamaan Regresi Linear ( $Y=a+bX_1$ + $bX_2$ )	$R^2$	Sig.
Pengelolaan Keuangan (X1)	Pengelolaan Aset (X2)	Efektivitas Operasional (Y)			
0,493	0,728	0,785	Y = -0,557 - 0,312X <sub>1</sub> + 2,076X <sub>2</sub>	0,82	0,078
0,598	0,73	0,803			
0,612	0,75	0,792			
0,61	0,79	0,906			
0,722	0,77	0,803			
0,726	0,765	0,805			

Berdasarkan temuan dari analisis regresi linear berganda yang tertera pada tabel di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,817 yang mengindikasikan bahwa 81,7% variasi dalam efektivitas operasional dapat dijelaskan oleh kedua variabel pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan, sementara sisanya sebesar 18,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan model penelitian ini.

Temuan dari uji F memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,078 (> 0,05), yang bermakna bahwa secara simultan variabel pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut, ketika diuji bersama-sama, belum mampu menunjukkan

kontribusi yang bermakna secara statistik. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian Manullang dan Maesaroh (2019) yang mengkaji efektivitas BPBD di Kabupaten Semarang, di mana ditemukan bahwa tidak semua faktor organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas operasional.

Namun demikian, hasil pengujian secara parsial mengungkapkan pola yang berbeda. Variabel pengelolaan keuangan memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,142 ( $> 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas operasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar, Burhanuddin, dan Guasmin (2020) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak selalu berdampak langsung pada kinerja operasional instansi.

Sebaliknya, variabel pengelolaan aset menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,035 ( $< 0,05$ ), yang berarti variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik praktik pengelolaan aset yang diterapkan, maka tingkat efektivitas operasional juga akan mengalami peningkatan. Temuan ini didukung oleh penelitian Agustin (2025) mengenai pengelolaan aset daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, yang menekankan pentingnya pengelolaan aset yang baik untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Sebaliknya, pengelolaan keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (sig. 0,142  $> 0,05$ ), sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel ini tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan efektivitas operasional dalam konteks penelitian ini. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi efektivitas operasional di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, seperti kualitas sumber daya manusia dan sistem koordinasi antar unit,

sebagaimana dikemukakan oleh Apriawan, Faisal, dan Hadi (2016) dalam penelitiannya tentang pengendalian logistik bencana di Sulawesi Tengah.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan kajian Febtiasari (tanpa tahun) mengenai implementasi kebijakan manajemen hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan efektivitas operasional pada BPBD Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan BPBD Sulawesi Tengah berfokus pada perencanaan anggaran sesuai kebutuhan, pencatatan keuangan yang mengikuti prosedur, serta pelaporan anggaran secara transparan dan akuntabel.
2. Strategi pengelolaan aset dilakukan melalui pendataan dan inventarisasi aset, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi penggunaan aset untuk mendukung kegiatan operasional penanggulangan bencana.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas operasional. Aset yang dikelola dengan baik membantu kelancaran tugas, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mempercepat respons ketika terjadi bencana.
4. Sementara itu, pengelolaan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masih perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas kerja BPBD.
5. Secara keseluruhan, efektivitas operasional BPBD lebih dipengaruhi oleh bagaimana aset direncanakan, dikelola, dan dimanfaatkan, sementara aspek keuangan berperan dalam mendukung administrasi tetapi belum memberi dampak signifikan terhadap operasional lapangan.
6. Dalam implementasinya, BPBD masih menghadapi berbagai kendala, baik pada aspek keuangan maupun aset, seperti keterbatasan anggaran, proses birokrasi yang panjang, jumlah sarana yang terbatas, serta pemeliharaan aset yang belum optimal.

## **5.2. Keterbatasan**

1. Kegiatan yang dilaksanakan hanya terbatas pada waktu pelaksanaan magang, sehingga hasil pengamatan dan analisis belum sepenuhnya mewakili keseluruhan aktivitas BPBD sepanjang tahun.
2. Data dan informasi yang diperoleh sebagian besar berasal dari observasi, wawancara, serta dokumen internal yang tersedia selama masa magang.
3. Fokus laporan lebih menekankan pada aspek administrasi dan koordinasi penanggulangan bencana, sehingga belum mencakup analisis teknis secara mendalam mengenai seluruh kegiatan operasional lapangan BPBD.

## **5.3. Saran**

1. Bagi Instansi BPBD
  - a. Perlu meningkatkan sistem administrasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan, agar lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
  - b. Penguatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis perlu ditingkatkan agar pemahaman tentang penanggulangan bencana menjadi lebih komprehensif.
  - c. Prioritas anggaran perlu diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional, terutama peralatan yang sifatnya mendesak dan penting untuk kesiapsiagaan bencana.
  - d. Sistem inventarisasi aset perlu diperbarui secara berkala agar proses pendataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset menjadi lebih terarah dan terintegrasi.
2. Bagi Penulis/Mahasiswa
  - a. Pengalaman magang sebaiknya dijadikan ruang untuk memperdalam kemampuan teknis dan memahami proses kerja organisasi pemerintah.
  - b. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, kemampuan komunikasi, dan pemahaman terhadap prosedur administrasi agar lebih siap memasuki dunia kerja.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil analisis menjadi lebih kuat dan representatif.
- b. Disarankan untuk meneliti variabel lain seperti kualitas SDM, koordinasi antarinstansi, atau perencanaan program untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas BPBD.
- c. Penelitian ke depan juga dapat meninjau efektivitas program mitigasi bencana berbasis masyarakat atau mengevaluasi kesiapsiagaan peralatan dan sumber daya di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

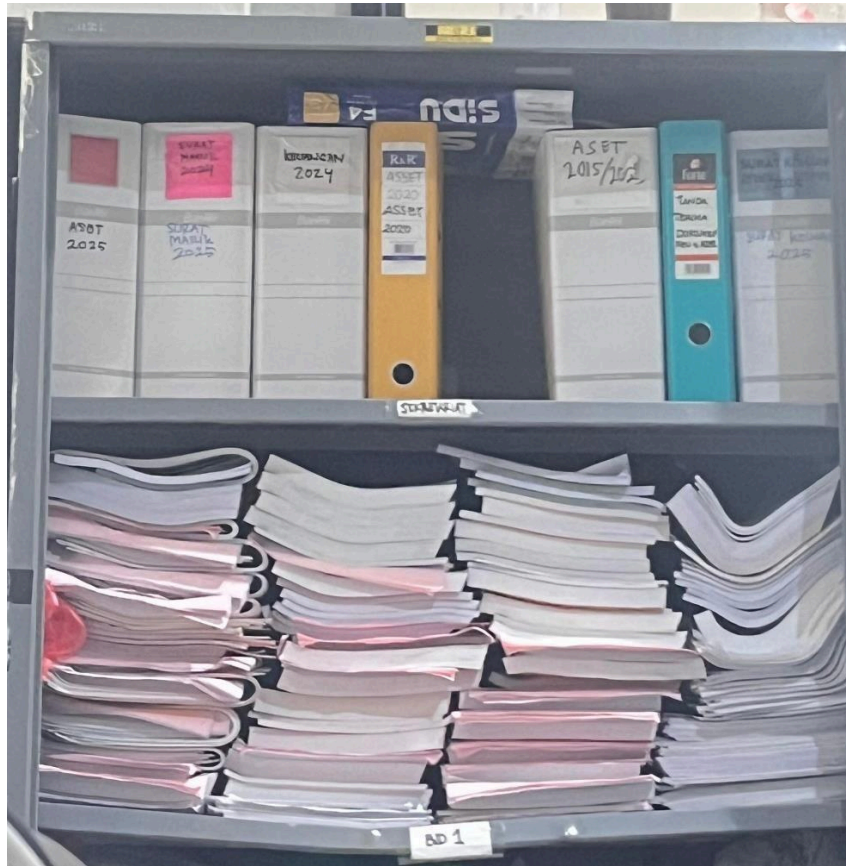
- Addila, N., Mattoasi, M., & Pakaya, L. (2024). Faktor–faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 234-249. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.265>
- Agustin, R. (2025). Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(02), 76-90. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/view/1839>
- Akbar, M. A., Burhanuddin, & Guasmin. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Keuangan Sulawesi*, 3(8). <https://doi.org/10.56338/jks.v3i8.1755>
- Angraini, R. (2025). Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Palopo. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/11693>
- Apriawan, M., Faisal, H. M., & Hadi, S. (2016). Analisis Penentuan Prioritas Pengendalian Logistik Bencana di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, 2(1), 59-68.
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21110>
- Fadilah, dkk. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 18.
- Febtiasari, A. (tanpa tahun). Implementasi Kebijakan Manajemen Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, 5(11), 147-154.
- Fitri, Z. A., & Handayani, N. (2024). Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Gandawijaya, dkk. (2025). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Strategi Pemasaran untuk Mengoptimalkan Penjualan Jahe Binangkit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 41-54.

- Handayani, L., dkk. (2023). Manajemen Strategis Pengelolaan Keuangan untuk Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Pendas Mahakam*, 158-169.
- Manullang, A., & Maesaroh, M. (2019). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 296-311. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i1.26407>
- Purwanza, S. W., dkk. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ridwan, M. (2020). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Kindai*, 523-541.
- Sukran, Rajindra, & Yusuf, D. (2020). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Keuangan Sulawesi*, 3(8). <https://doi.org/10.56338/jks.v3i8.1753>
- Tani, L. C., Manossoh, H., & Wokas, H. R. (2020). Analisis Pengelolaan Akuntansi Aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 88-93.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan





## Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian

### **KUISISIONER PENELITIAN STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERHADAP EFEKTIVITAS OPERASIONAL BPBD**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenalan Nama saya Ichfa Farida Ramadhani, Mahasiswa Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana daerah Sulawesi tengah sebagai Penunjang Tugas akhir yang berjudul: **“ PENGARUH STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERHADAP EFEKTIVITAS OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) SULAWESI TENGAH ”**

Sehubungan dengan maksud tersebut, saya mohon ketersediaan waktu saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini. Diharapkan dapat mengisi setiap poin pertanyaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya-benarnya. Maka seluruh data dan informasi responden akan dijaga kerahasiaannya.

silahkan jawab pertanyaan dibawah ini dengan cara pilih salah satu pilihan dibawah ini sesuai dengan pilihan dibawah ini.

- 1 = Tidak setuju
- 2 = kurang setuju
- 3 = Cukup setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Atas kesediaan waktu yang dan kerja sama saudara/i, saya ucapkan terima kasih. jika ada saran dan masukan terkait kuisisioner ini mohon untuk komentarnya.

### Section 1 Data Responden

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Lama bekerja :

### Section 2 Strategi pengolahan aset

1. BPBD menyusun anggaran berdasarkan rencana kerja yang jelas dan terukur

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

2. Proses penganggaran di BPBD melibatkan semua unit terkait

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

3. Realisasi anggaran diawasi secara berkala untuk memastikan efisiensi

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

4. Penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

5. BPBD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran setiap tahun

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

6. Sumber pendanaan dikelola sesuai peraturan dan kebutuhan darurat

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

### Section 3 Strategi Pengolahan Aset

7. Inventarisasi aset dilakukan secara rutin dan akurat

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

8. Setiap aset memiliki kode dan tercatat dalam sistem yang terdokumentasi

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

9. BPBD memelihara dan merawat aset secara berkala

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

10. Pemanfaatan aset dilakukan secara efisien dan sesuai kebutuhan

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

11. Aset yang tidak digunakan dilaporkan dan dikelola sesuai prosedur

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

12. Penghapusan atau pengadaan aset dilakukan berdasarkan perencanaan

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

#### Section 4 Efektivitas Operasional

13. BPBD merespon bencana dengan cepat dan tepat

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

14. Kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sesuai SOP

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

15. SDM dan peralatan operasional tersedia dengan cukup saat dibutuhkan

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

16. Koordinasi antar unit berjalan baik dalam kegiatan operasional

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

17. Anggaran dan aset mendukung kelancaran operasional di lapangan

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

18. BPBD mampu menyelesaikan tugas penanggulangan sesuai target waktu

1	Tidak setuju
2	kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

### Lampiran 3 Hasil Uji Validitas, Uji Reabilitas Dan Regresi Linear

#### 1. Uji Validitas Strategi Pengelolaan Keuangan (X1)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Y1
X1.1	Pearson Correlation	1	.310	-.015	.132	.310	.139	.493*
	Sig. (2-tailed)		.226	.953	.612	.226	.594	.044
	N	17	17	17	17	17	17	17
X1.2	Pearson Correlation	.310	1	.091	-.044	.292	.538*	.598*
	Sig. (2-tailed)	.226		.728	.868	.256	.026	.011
	N	17	17	17	17	17	17	17
X1.3	Pearson Correlation	-.015	.091	1	.604*	.350	.351	.612**
	Sig. (2-tailed)	.953	.728		.010	.169	.167	.009
	N	17	17	17	17	17	17	17
X1.4	Pearson Correlation	.132	-.044	.604*	1	.450	.239	.610**
	Sig. (2-tailed)	.612	.868	.010		.070	.355	.009
	N	17	17	17	17	17	17	17
X1.5	Pearson Correlation	.310	.292	.350	.450	1	.343	.722**
	Sig. (2-tailed)	.226	.256	.169	.070		.177	.001
	N	17	17	17	17	17	17	17
X1.6	Pearson Correlation	.139	.538*	.351	.239	.343	1	.726**
	Sig. (2-tailed)	.594	.026	.167	.355	.177		.001
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y1	Pearson Correlation	.493*	.598*	.612**	.610**	.722**	.726**	1
	Sig. (2-tailed)	.044	.011	.009	.009	.001	.001	
	N	17	17	17	17	17	17	17

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Validitas Strategi Pengelolaan Aset (X2)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Y2
X2.1	Pearson	1	.483*	.659**	.465	.375	.368	.728**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		.050	.004	.060	.138	.146	.001
	N	17	17	17	17	17	17	17
X2.2	Pearson	.483*	1	.320	.625**	.366	.394	.730**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.050		.211	.007	.148	.117	.001
	N	17	17	17	17	17	17	17
X2.3	Pearson	.659**	.320	1	.341	.495*	.602*	.750**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.004	.211		.180	.044	.011	.001
	N	17	17	17	17	17	17	17
X2.4	Pearson	.465	.625**	.341	1	.605*	.499*	.790**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.060	.007	.180		.010	.041	.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
X2.5	Pearson	.375	.366	.495*	.605*	1	.724**	.770**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.138	.148	.044	.010		.001	.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
X2.6	Pearson	.368	.394	.602*	.499*	.724**	1	.767**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.146	.117	.011	.041	.001		.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y2	Pearson	.728**	.730**	.750**	.790**	.770**	.767**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.001	.000	.000	.000	
	N	17	17	17	17	17	17	17

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 3. Hasil Uji Efektivitas Operasional

		Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.789**	.402	.566*	.789**	.574*	.785**
	Sig. (2-tailed)		.000	.110	.018	.000	.016	.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y2	Pearson Correlation	.789**	1	.509*	.717**	.595*	.540*	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000		.037	.001	.012	.025	.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y3	Pearson Correlation	.402	.509*	1	.930**	.509*	.457	.792**
	Sig. (2-tailed)	.110	.037		.000	.037	.065	.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y4	Pearson Correlation	.566*	.717**	.930**	1	.717**	.544*	.906**
	Sig. (2-tailed)	.018	.001	.000		.001	.024	.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y5	Pearson Correlation	.789**	.595*	.509*	.717**	1	.540*	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.037	.001		.025	.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y6	Pearson Correlation	.574*	.540*	.457	.544*	.540*	1	.805**
	Sig. (2-tailed)	.016	.025	.065	.024	.025		.000
	N	17	17	17	17	17	17	17
Y	Pearson Correlation	.785**	.803**	.792**	.906**	.803**	.805**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	17	17	17	17	17	17	17

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Reliabilitas Strategi Pengelolaan Keuangan (X1)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.693	6

5. Hasil Uji Reliabilitas Strategi Pengelolaan Aset (X2)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	6

6. Hasil Uji Reliabilitas Efektivitas Operasional (Y)

**Case Processing Summary**

Cases	N		%
	Valid	Excluded <sup>a</sup>	Total
	17	0	100.0
	17		100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

7. Hasil Uji Regresi Linear

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
	1	X2, X1 <sup>b</sup>	

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 <sup>a</sup>	.305	.206	2.21066

a. Predictors: (Constant), X2, X1

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.052	2	15.026	3.075	.078 <sup>b</sup>
	Residual	68.418	14	4.887		
	Total	98.471	16			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.973	7.946		1.381	.189
	X1	.436	.466	.346	.934	.366
	X2	.197	.311	.235	.635	.536

a. Dependent Variable: Y

8. Tabel Nilai-Nilai  $r$  *Product Moment* untuk menentukan nilai  $r$  kritis

NILAI-NILAI  $r$  PRODUCT MOMENT

N	Tarf Signifikan		N	Tarf Signifikan		N	Tarf Signifikan	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			

Sumber: Sugiyono.2008. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Hal. 373

## **CURICULUM VITAE ICHFA**

### **FARIDA RAMADHANI**

Jl. Tengiri Raya, Mladangan, Minomartani, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55581

Ichfatarida123@gmail.com 082238xxxxxx

### **TENTANG SAYA**

---

Saya adalah mahasiswa aktif semester 8 program studi S1 Akuntansi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saya memiliki ketertarikan dibidang F&B dan paham dunia F&B. Saya memiliki pengalaman di dunia F&B selama 3 tahun. Saya memiliki minat kerja yang tinggi, dapat berkomunikasi dengan baik, jujur, peka terhadap hal sekitar yang berkaitan dengan pekerjaan dan dapat bekerja dengan tim.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

---

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA** S1 Akuntansi - Angkatan 2021

IPK: 3.33

**SMAN MODEL MADANI PALU** Jurusan IPS

### **PENGALAMAN**

---

#### **GETWELLSWEET.KITCHEN**

Head Kitchen (1 Tahun 4 Bulan)

- Menghandle seluruh kegiatan operasional dapur selama proses produksi, mulai dari pengadaan dan pengelolaan bahan baku, proses produksi, quality control, hingga tahap packing produk. Bertanggung jawab atas efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Admin (8 Bulan)

- Mengelola komunikasi dengan customer melalui berbagai platform digital, menerapkan teknik upselling yang efektif sehingga mampu mencapai target penjualan hingga 500 pcs per periode pre-order, serta melakukan customer relationship management untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.

Kitchen Helper (1 Tahun)

- Membantu head kitchen dalam menyiapkan segala kebutuhan produksi, mempersiapkan perlengkapan dan peralatan dapur, serta bertanggung jawab atas kebersihan dan perawatan seluruh equipment dapur setelah selesai digunakan.

## **KECAKAPAN**

---

- **MicrosoftOffice** (Intermediate)
- **MicrosoftExcel** (Intermediate)